

A Comparative of Vocational Education System in Indonesia and Germany: A Qualitative Descriptive Study Based on the Perspective of Vice Principal for Student Affairs

Mochamad Dicky Yudhantaka^{1*}, Zakiah Maulidi Putri¹, Asep Kurniawan¹

¹Master's Program, Department of Islamic Education Management, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

INDONESIA

*Corresponding author: takayudhantaka1998@gmail.com

Received June 6th 2025; Revised June 11th 2025; Accepted June 13^h 2025

Abstract

This study aims to describe a comparative analysis of the vocational high school (SMK) education systems in Indonesia and Germany, as viewed from the perspective of the Vice Principal for Student Affairs at SMKN 1 Kedawung. The research adopts a qualitative approach using descriptive methods. Data were obtained through documentation and interviews with key informants, specifically the Vice Principal for Student Affairs at SMKN 1 Kedawung in Cirebon. Data collection techniques included document analysis and semi-structured interviews, while data analysis was conducted through the processes of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the vocational education system in Germany is highly integrated and well-established, particularly when compared to those of other developed countries. The Dual System (Ausbildung) model implemented in Germany is globally recognized as a prestigious framework for vocational education and training. This system provides numerous advantages for students, including a curriculum that is continuously updated and aligned with industry demands, opportunities to gain practical work experience, improved career prospects with competitive remuneration, and direct learning within actual work environments. In contrast, the adoption of the Dual System model in Indonesia continues to face several challenges, particularly in terms of relevance, quality, and industry engagement. Nevertheless, efforts toward improvement and systemic reform are ongoing

Keywords: *Model Dual System Ausbildung, Vocational education system, Perspective*

Perbandingan Sistem Pendidikan Kejuruan di Indonesia dan Jerman: Studi Deskriptif Kualitatif Berdasarkan Perspektif Wakasek Kesiswaan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbandingan Sistem Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara Indonesia dan Jerman menggunakan perspektif Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Kedawung berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dokumentasi dan informan dari Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Kedawung di Cirebon. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan sistem pendidikan kejuruan di Jerman yang sangat terintegrasi dan baik, apabila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. *Model Dual System Ausbildung* di Jerman juga sebuah sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang sangat dihargai di seluruh dunia. Sistem ini menawarkan banyak manfaat bagi siswa, antara lain kurikulum yang up-to-date dan relevan dengan kebutuhan industri, peluang untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga, prospek karier yang lebih baik dengan gaji yang kompetitif, dan kesempatan untuk belajar secara langsung di lingkungan kerja. Namun, di Indonesia penerapan *Model Dual System Ausbildung* masih menghadapi tantangan dalam hal relevansi, kualitas, dan keterlibatan industri, meskipun terus dilakukan perbaikan dan reformasi.

Kata kunci: *Model Dual System Ausbildung*, Sistem Pendidikan Kejuruan, Perspektif

I. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi peranan terpenting dalam kehidupan manusia, juga sebagai dasar pengalaman manusia dalam mencari ilmu baik dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, informal yang berlangsung seumur hidup agar dapat mencapai tujuan serta memiliki kemampuan berpikir positif. Di era sekarang pendidikan formal sudah sangat mapan dan menjadi mainstream pembangunan pendidikan dan pendidikan non-formal dalam perkembangannya menunjukkan peran penting dalam pendidikan orang dewasa (Arif Rembangsupu et al., 2022). Dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia baik secara individu atau pun kolektif ialah melalui pendidikan kolektif. Sebab pendidikan mengarahkan kita pada kemauan yang kuat untuk bangkit dan membentuk suatu keahlian yang dibutuhkan untuk bisa berdiri sebagai negara kuat, kokoh, dan mandiri. Keyakinan tersebut mengantarkan peradaban manusia kepada pembentukan sistem pendidikan yang bisa dipandang sebagai hal yang wajib ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Isri, 2015).

Hofstede (2001) menyatakan teori bahwa penyesuaian terhadap keunikan yang dimiliki setiap komunitas pada umumnya tidak terlepas dari nilai, ritual, teladan, dan juga simbol (Hofstede, 2001). Setiap negara mengembangkan suatu sistem pendidikan yang diyakini unggul dan dapat menjadi acuan ideal bagi pencapaian tujuan pendidikan. Di dunia ini tentu beragam sistem pendidikan yang diciptakan berdasarkan prinsip pendidikan yang sama, namun tetap dengan perbedaan baik dari tingkatan kebijakan, teknis pelaksanaan, dan pendidikan.

Terlebih, di era globalisasi ini yang secara terus menerus mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mendorong para petinggi pendidikan untuk meninggalkan pola pikir yang sempit guna mengembangkan sistem pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilihat melalui kaca mata kuda, tetapi para petinggi kebijakan pendidikan bisa terfokus pada sistem pendidikan itu sendiri. Di mana pola pandang egosentris hanya akan membuat sistem pendidikan menjadi rentan akan risiko stagnasi pendidikan karena tidak ada upaya untuk benchmarking dengan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pihak lain.

Tingkat pendidikan merupakan indikator penting mengenai sejauh mana sumber daya manusia suatu negara telah mengalami transformasi yang signifikan. Kualitas sumber daya manusia suatu negara berhubungan langsung dengan tingkat pendidikan yang dimiliki warga negaranya (Ivanova, I., Arcelus, F. J., & Srinivasan, 1999). Kualitas pendidikan sangat diperlukan hal ini berkaitan dengan terciptanya manusia yang cerdas dan terdidik untuk membangun masa depan. Pendidikan diharapkan dapat membuka potensi siswa serta mengetahui pemecahan masalah yang akan datang (A et al., 2023). Pendidikan juga tidak bisa dipisahkan dalam upaya pencapaian sumber daya manusia.

Untuk menjadikan warga negara yang maju pada dasarnya Sistem Pendidikan Nasional memiliki kualitas yang bagus. Hal ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang gigih dan berkualitas, juga fasilitas yang mendukung. Maka, Indonesia dapat lebih fokus dalam meningkatkan sistem pendidikan kejuruan atau bisa disingkat dengan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Di Indonesia sendiri sekolah menengah terbagi menjadi dua, yaitu SMA dan SMK. Sedangkan di dalam artikel ini peneliti akan berfokus pendidikan kejuruan atau SMK. Sebelum kemerdekaan, di Indonesia telah ada pendidikan kejuruan atau vokasi yang pertama kali diselenggarakan oleh Belanda dan pendidikan vokasi ini dinamakan Institut Teknologi Bandung (ITB) sehingga terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan revolusi pada dunia pendidikan.

Pendidikan kejuruan pada masa itu terdapat bidang keahlian, yaitu sekolah kewanitaan, teknik, pertanian dan perdagangan (Suharno et al., 2020). Pada periode tersebut pendidikan kejuruan dinamakan sekolah teknik menengah (STM) hingga tahun 1998. Selain itu, penting untuk sebuah negara memprioritaskan peningkatan pendidikan kejuruan dikarenakan pasar tenaga kerja internasional membutuhkan para pekerja yang terampil dengan keahlian di bidang tertentu dan dapat dikembangkan melalui pendidikan kejuruan (Wiriadidjaja et al., 2019). Di negara Industri, permintaan terkait pekerja terampil di pasar tenaga kerja sangatlah besar, termasuk di Amerika dan Eropa.

Pemaparan Atthareq & Affandi (2023) dalam Zenon Cedd Nicanor Alnoth (2024) sumber daya manusia di Indonesia yang melimpah ini memiliki potensi besar untuk mengisi peluang terkait permintaan tenaga kerja yang terampil (Alnoth, 2024). Oleh karena itu, pendidikan kejuruan Indonesia berbasis pada penyediaan program yang memprioritaskan pada kebutuhan pasar dan praktik sehingga meningkatkan kemampuan dan keterampilan lulusan SMK yang didasari dengan prinsip partisipasi belajar sepanjang hayat. Indonesia dapat memperoleh wawasan bermakna dari negara maju seperti Jerman, karena Jerman dikenal sebagai kontributor terkemuka di bidang pendidikan (Wiriadidjaja et al., 2019).

Lulusan SMK memiliki peluang yang luas, tidak terbatas hanya pada satu bidang pekerjaan. Mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, merintis usaha sendiri, bekerja di sektor industri, atau melanjutkan ke pendidikan vokasi maupun profesi. Pendidikan vokasi berfokus pada penguasaan keterampilan praktis tertentu yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik, pendidikan vokasi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai, tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari hal-hal yang tidak relevan. Lulusan dari jalur ini akan memiliki keahlian khusus serta pengalaman kerja yang menjadi modal penting bagi masa depan mereka. Meskipun secara definisi pendidikan kejuruan dan vokasi berbeda, pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.

Pendidikan vokasi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara dalam ekonomi global. Dengan perubahan cepat di pasar kerja dan perkembangan teknologi, pendidikan vokasi menawarkan solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Pendidikan vokasi masuk kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sebuah negara harus menginvestasikan lebih banyak perhatian dalam peningkatan pendidikan vokasi. Dalam Wulidah Ning Tiasari et.al (2025) hakikat pendidikan ini harus dipahami oleh para pemangku kepentingan (Tiasari et al., 2025). Banyak negara belum berhasil menyelenggarakan pendidikan ini karena para pemangku kepentingan mereka tidak memahami konsepnya.

Hubungan Indonesia dan Jerman telah berlangsung cukup lama sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini. Selama masa kerja sama tersebut, Indonesia dan Jerman telah menghasilkan berbagai kesepakatan dan melaksanakan berbagai forum bersama (Laoli, 2024). Dari kerja sama tersebut, Indonesia juga mengambil kesempatan untuk mengatasi isu terkait ketenagakerjaan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah dengan memunculkan *Model Dual System Ausbildung* sebagai hasil dari kerja sama pemerintah Indonesia dan Jerman. *Model Dual System Ausbildung* merupakan program yang menggabungkan teori dengan pelatihan langsung di berbagai bidang pada industri Jerman (Bappenas, 2017).

Model Dual System Ausbildung memungkinkan siswa memperoleh pengalaman langsung di tempat kerja. Minat dan kemampuan mereka sekaligus memberikan kesempatan untuk mereka berpindah jalur. Kebijakan inklusi memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kelompok dalam masyarakat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, digitalisasi menjadi prioritas karena memperkenalkan teknologi modern dalam proses pembelajaran untuk mendukung fleksibilitas dan efisiensi. Statistik menunjukkan bahwa lulusan pendidikan kejuruan lebih cepat mendapatkan pekerjaan daripada lulusan akademis, terutama di bidang teknis dan industri. Sistem sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan-badan profesional, seperti kamar dagang dan asosiasi industri, memberikan jaminan mutu dan pengakuan luas terhadap kompetensi lulusan. Sementara di Indonesia sendiri, *Model Dual System Ausbildung* belum cocok jika diterapkan, terutama di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 1 Kedawung Kabupaten Cirebon. Selain karena beberapa tantangan di Kabupaten Cirebon yang bersifat kultural, sosial, maupun lokal. Tetapi juga, terdapat tantangan lain yakni keterbatasan akses dan kemitraan antara SMK dengan industri yang memadai karena tidak semua perusahaan siap dalam berinvestasi pelatihan jangka panjang serta tidak semua individu cocok dengan pola pembelajaran yang begitu ketat. Sehingga SMKN 1 Kedawung masih terkendala dalam mengoptimalkan *Model Dual System Ausbildung*.

Salah satu hal penting dalam perjalanan hidup dan pengembangan diri adalah aktivitas membandingkan. Disadari atau tidak, manusia cenderung menilai dirinya dengan merujuk pada situasi serupa pada orang lain. Tanpa adanya perbandingan, perkembangan dalam hidup bisa menjadi lambat, atau bahkan tidak mengalami perubahan berarti ke arah yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, studi perbandingan memiliki peran yang signifikan, terutama sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan suatu negara.

Dengan mempelajari kelebihan sistem pendidikan di negara lain, kita dapat memperoleh wawasan baru dan menerapkannya demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perbandingan sistem pendidikan kejuruan di Jerman, dengan menelaah konsep serta penerapannya, dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi perbaikan mutu pendidikan kejuruan di Indonesia. Dalam kajian ini, beberapa aspek penting seperti sosial, agama, politik, ekonomi, dan letak geografis turut menjadi pertimbangan dalam menganalisis perbandingan sistem pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membahas perbandingan sistem pendidikan kejuruan antara Jerman dan Indonesia. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMKN 1 Kedawung guna memperoleh sudut pandang baru terkait variabel yang dikaji. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan studi pustaka sebagai bagian dari teknik pengumpulan data, dengan merujuk pada beragam literatur seperti artikel jurnal, buku, situs resmi, laporan institusi, serta berita yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif ini diperkuat dengan referensi dari berbagai sumber untuk mendukung validitas analisis. Tahapan analisis data dalam penelitian meliputi pengumpulan, interpretasi, deskripsi, analisis mendalam, hingga penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggali makna dan pemahaman terhadap isu yang diangkat. Untuk menjamin

keabsahan data, peneliti mengandalkan triangulasi sumber guna memperoleh informasi yang valid dan terpercaya. Di samping itu, keandalan data ditingkatkan dengan menggunakan aplikasi bibliografi *Mendeley Desktop* sebagai alat bantu dalam pengelolaan kutipan dan referensi.

III. HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pendidikan di Jerman

Pada masa awal, gereja Katolik dan Protestan memegang peran dominan dalam membangun sistem pendidikan di Jerman (Sihombing, 2019). Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan universitas yang menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. Gereja juga berperan dalam membentuk nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam sistem pendidikan, sehingga memiliki pengaruh kuat dalam menentukan kurikulum, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan. Namun, pada abad ke-19, kebijakan *Kulturkampf* yang diterapkan oleh *Kanselir Otto von Bismarck* menandai pergeseran peran yang signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh gereja dalam sistem pendidikan dan memperkuat kontrol negara. Konflik ini menunjukkan perdebatan yang mendalam tentang peran negara dan agama dalam pendidikan, serta bagaimana kedua lembaga ini bersaing untuk membentuk arah dan tujuan pendidikan (Adytya & Sassi, 2024).

Perang Dunia II dan pasca perang membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman Barat dan Timur mengalami perkembangan yang berbeda, dipengaruhi oleh ideologi masing-masing negara. Pasca reunifikasi Jerman, sistem pendidikan di seluruh Jerman mengalami reformasi untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan inklusif (Heri Laksana, 2018). Meskipun negara telah mengambil alih peran dominan dalam mengelola dan mengatur sistem pendidikan, agama tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam pendidikan di Jerman. Dalam Mustafa (2018) sistem pendidikan di Jerman saat ini merupakan hasil dari interaksi panjang dan kompleks antara negara dan agama (Mustafa, 2018). Pengaruh agama dapat dilihat dalam struktur, kurikulum, dan nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem pendidikan Jerman. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Jerman adalah bagaimana mewujudkan inklusivitas dalam konteks dualisme peran negara dan agama. Sistem pendidikan perlu memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang agama mereka, mendapatkan akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan.

Adytya et al (2024) historis dualisme memiliki peran antara negara dan agama dalam sistem pendidikan di Jerman merupakan karakteristik yang unik dan kompleks. Hubungan antara kedua lembaga ini telah mengalami berbagai fase, mulai dari kolaborasi hingga konflik. Pengaruh historis ini terus membentuk sistem pendidikan di Jerman hingga saat ini. Temuan penelitian ini mengungkap dinamika kompleks antara negara dan agama dalam membentuk sistem pendidikan di Jerman. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua lembaga ini tidak selalu harmonis, namun telah membentuk sistem pendidikan yang kita kenal sekarang (Adytya & Sassi, 2024).

Peran gereja Katolik dan Protestan dalam membangun sistem pendidikan awal di Jerman sangat signifikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan universitas, menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. Gereja juga berperan dalam membentuk nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam sistem pendidikan, sehingga memiliki pengaruh kuat dalam menentukan kurikulum, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, negara secara bertahap mengambil alih peran dalam mengelola dan mengatur sistem pendidikan. Kebijakan *Kulturkampf* yang diterapkan oleh *Kanselir Otto von Bismarck* pada abad ke-19 merupakan contoh nyata dari pergeseran peran ini (PUTRA SEPTO ADI, 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh gereja dalam sistem pendidikan dan memperkuat kontrol negara. Konflik ini menunjukkan perdebatan yang mendalam tentang peran negara dan agama dalam pendidikan, serta bagaimana kedua lembaga ini bersaing untuk membentuk arah dan tujuan pendidikan.

Perang Dunia II dan pasca perang membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman Barat dan Timur mengalami perkembangan yang berbeda, dipengaruhi

oleh ideologi masing-masing negara. Pasca reunifikasi Jerman, sistem pendidikan di seluruh Jerman mengalami reformasi untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan inklusif. Meskipun negara telah mengambil alih peran dominan dalam mengelola dan mengatur sistem pendidikan, agama tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam pendidikan di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman saat ini merupakan hasil dari interaksi panjang dan kompleks antara negara dan agama. Pengaruh agama dapat dilihat dalam struktur, kurikulum, dan nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem pendidikan Jerman (Adytiya & Sassi, 2024).

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Jerman adalah bagaimana mewujudkan inklusivitas dalam konteks dualisme peran negara dan agama. Sistem pendidikan perlu memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang agama mereka, mendapatkan akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan. Penting untuk memahami bahwa dualisme peran antara negara dan agama dalam sistem pendidikan di Jerman bukanlah fenomena statis. Hubungan antara kedua lembaga ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Tantangan di masa depan adalah bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan menghormati keragaman budaya dan agama di Jerman, sambil tetap menjaga kualitas pendidikan dan nilai-nilai moral yang penting bagi masyarakat. historitas dualisme peran negara dan agama dalam sistem pendidikan di Jerman sangat penting untuk memahami sistem pendidikan Jerman saat ini, serta untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan. Sistem pendidikan Jerman perlu terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru, sambil tetap menghormati peran penting agama dalam pendidikan.

Berdasarkan penjabaran di atas sistem pendidikan di Jerman merupakan hasil dari interaksi panjang dan kompleks antara lembaga negara dan agama. Hubungan antara kedua lembaga ini telah mengalami pasang surut sepanjang sejarah, mulai dari kolaborasi hingga konflik. Pada masa awal, gereja memegang peran dominan dalam membangun sistem pendidikan, namun seiring berjalannya waktu, negara secara bertahap mengambil alih peran dalam mengelola dan mengatur sistem pendidikan. Konflik antara negara dan agama, seperti yang terlihat dalam kebijakan *Kulturkampf*, menunjukkan perdebatan yang mendalam tentang peran masing-masing lembaga dalam pendidikan. Meskipun negara telah mengambil alih peran dominan, agama tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem pendidikan di Jerman. Pengaruh ini dapat dilihat dalam struktur, kurikulum, dan nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem pendidikan. Tantangan di masa depan adalah bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan menghormati keragaman budaya dan agama di Jerman, sambil tetap menjaga kualitas pendidikan dan nilai-nilai moral yang penting bagi masyarakat. Memahami historitas dualisme peran negara dan agama dalam sistem pendidikan di Jerman sangat penting untuk memahami sistem pendidikan Jerman saat ini, serta untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan. Sistem pendidikan Jerman perlu terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru, sambil tetap menghormati peran penting agama dalam pendidikan.

1) Sistem Pendidikan Kejuruan di Jerman

Sistem Pendidikan kejuruan di Jerman, yang melibatkan *Berufsschule* dan *Model Dual System Ausbildung* dalam memastikan kesiapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran yang rendah. *Model Dual System Ausbildung* yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman langsung di tempat kerja. Perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini merupakan mitra utama dalam melatih siswa sambil memastikan materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Data dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jerman pada bulan Mei 2024 adalah sekitar 3,3%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara-negara Uni Eropa. Kontribusi pendidikan vokasi terhadap rendahnya tingkat pengangguran ini sangat signifikan karena lulusan program ini tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang tinggi tetapi juga siap bersaing di pasar global.

Pemerintah Jerman terus berupaya mereformasi sistem pendidikan dengan menerapkan kebijakan inklusi dan digitalisasi pembelajaran. Perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini merupakan mitra utama dalam melatih siswa sambil memastikan materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sistem pendidikan di tengah perubahan global. Efektivitas sistem pendidikan Jerman juga tercermin dalam dampaknya terhadap mobilitas sosial dan ekonomi. Statistik menunjukkan bahwa lulusan pendidikan kejuruan lebih cepat mendapatkan pekerjaan daripada lulusan akademis, terutama di bidang teknis dan industri. Sistem sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan-badan profesional, seperti kamar dagang dan asosiasi industri, memberikan jaminan mutu dan pengakuan luas terhadap kompetensi lulusan. Dengan semua keunggulan ini, sistem pendidikan di Jerman berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan memberikan peluang yang lebih signifikan bagi siswa untuk meningkatkan standar hidup mereka. sektor (Adyitiya & Sassi, 2024).

2) Implementasi *Model Dual System Ausbildung* di Jerman

Model Dual System Ausbildung memadukan pembelajaran teori di sekolah dengan pelatihan industri praktis, yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman langsung di tempat kerja. minat dan kemampuan mereka sekaligus memberi mereka kesempatan untuk berpindah jalur bila perlu. Kebijakan inklusi memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kelompok dalam masyarakat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, digitalisasi menjadi prioritas, terutama setelah pandemi COVID-19, karena memperkenalkan teknologi modern dalam proses pembelajaran untuk mendukung fleksibilitas dan efisiensi. Inisiatif ini memperkuat daya saing industri Jerman sistem pendidikan di tengah perubahan global. Efektivitas sistem pendidikan Jerman juga tercermin dalam dampaknya terhadap mobilitas sosial dan ekonomi. Statistik menunjukkan bahwa lulusan pendidikan kejuruan lebih cepat mendapatkan pekerjaan daripada lulusan akademis, terutama di bidang teknis dan industri. Sistem sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan-badan profesional, seperti kamar dagang dan asosiasi industri, memberikan jaminan mutu dan pengakuan luas terhadap kompetensi lulusan. Dengan semua keunggulan ini, sistem pendidikan di Jerman berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan memberikan peluang yang lebih signifikan bagi siswa untuk meningkatkan standar hidup mereka.

Pendidikan berlangsung selama 3,5 tahun dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya. Penerapan penyedia terdapat kemitraan dengan dunia usaha di tingkat lokal. Penilaian di Jerman meliputi ujian teori, praktik di perusahaan, dan proyek akhir, yang menghasilkan sertifikat nasional yang diakui di seluruh Jerman dan Uni Eropa. Sebaliknya, di Indonesia, penilaian dilakukan melalui uji kompetensi berbasis nasional oleh Badan Sertifikasi Profesi berbasis pertanian. teknologi modern, seperti di Jerman, masih terbatas, meskipun Lembaga (LSP), termasuk teori, praktik, dan ujian proyek bidang tertentu.

Materi teoritis ini Struktur Kurikulum dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar yang mendasari praktik modern. Di sisi lain, praktik langsung mengambil porsi 40–50% sesuai dengan standar industri. Diskusi Jerman dirancang untuk menyeimbangkan teori dan praktik, mempersiapkan lulusan yang secara akademis kompeten dan terampil di tempat kerja. *Model Dual System Ausbildung* memberikan pengalaman belajar yang unik dengan menggabungkan pembelajaran teori di sekolah kejuruan (*Berufsschule*) dengan praktik langsung di perusahaan. Peserta didik menghabiskan 2–3 hari perminggu di sekolah untuk mempelajari teori, sementara sisa waktunya dihabiskan untuk berlatih di tempat kerja.

Model Dual System Ausbildung dianggap penting dalam pendidikan di Jerman karena menawarkan integrasi teori dan praktik yang erat. Hal ini membantu peserta didik memahami penerapan praktis dari konsep yang dipelajari di kelas dan memastikan bahwa mereka siap bekerja sesuai dengan standar industri. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi langsung dalam membentuk kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global (Astuti et al., 2024).

B. Sistem Pendidikan di Indonesia

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3, sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan unsur pendidikan yang saling terhubung dan berfungsi secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Abdul Kadir dan rekan-rekannya, sistem pendidikan nasional dirancang dengan misi utama untuk menyediakan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Tujuannya adalah agar setiap individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar minimal. Keterampilan tersebut mencakup kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta penggunaan bahasa Indonesia, yang merupakan bekal penting agar warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Wahab Syakrani et al., 2022).

Perumusan tujuan pendidikan nasional di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali revisi secara formal, dan rumusan terbaru mengenai tujuan seperti disebutkan dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab II Pasal 3 yang berbunyi: Tujuan pendidikan nasional ialah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan di Indonesia bisa dibaca pada GBHN, berbagai peraturan pemerintah dan Undang-Undang pendidikan. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), ditegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karakter manusia yang ingin dibentuk adalah pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, kepribadian yang kuat, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, memiliki etos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat secara fisik dan mental (Pidarta, 1997).

Nilai-nilai dalam pendidikan di Indonesia telah dikembangkan melalui berbagai cara, seperti pengajaran agama di sekolah dan perguruan tinggi, penyuluhan keagamaan di masyarakat, pembinaan kehidupan beragama di asrama, serta siaran keagamaan melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini mengalami penurunan, yang terlihat dari mutu tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran, serta peserta didik itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat dua pendekatan utama yang dapat dilakukan. Pertama, pendekatan sistemik, yaitu dengan mereformasi sistem sosial yang berhubungan dengan pendidikan. Kedua, pendekatan teknis, yang mencakup perbaikan aspek teknis yang langsung berkaitan dengan proses pendidikan. Saat ini, sistem pendidikan Indonesia sangat bergantung pada penerapan kurikulum baru yang masih dalam tahap uji coba untuk menemukan rumusan pendidikan yang lebih efektif.

Sistem Pendidikan Nasional masih cenderung mempertahankan paradigma tradisional, di mana pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang ditransfer dari guru yang lebih tahu kepada murid yang tidak tahu. Pola hubungan yang terbentuk adalah guru sebagai pusat informasi yang aktif, sementara murid bersifat pasif—guru menjelaskan, murid menerima tanpa mempertanyakan. Tidak ada ruang untuk kritik atau perbedaan pendapat terhadap pandangan guru; yang terjadi hanyalah permintaan penjelasan dan kemudian mengikuti apa yang disampaikan. Pandangan ini sudah tidak relevan dalam konteks pendidikan modern, yang justru menekankan bahwa ilmu harus dicari, bukan sekadar diajarkan. Pola interaksi baru menempatkan guru sebagai fasilitator dan pendamping yang mendorong siswa untuk secara aktif mencari dan menemukan pengetahuan bersama. Siswa berperan sebagai pencari ilmu yang memiliki kemandirian dalam proses belajarnya. Selain itu, dalam paradigma pendidikan di era reformasi, ilmu pengetahuan tidak dianggap sebagai sesuatu yang sudah final atau mutlak dimiliki, melainkan sebagai sesuatu yang terus berkembang. Proses pencarian dan pembentukan diri sebagai ilmuwan atau intelektual menjadi bagian penting yang tidak pernah berhenti. Dalam era global ini, pendidikan formal mungkin memiliki batas, namun proses belajar bersifat terus-menerus. Nilai dari ilmu tidak lagi diukur dari hasil akhirnya, tetapi dari proses dan metode pencariannya. Dengan

demikian, pendekatan pembelajaran modern lebih menekankan pada penelitian dan eksplorasi, bukan sekadar menerima pengetahuan yang sudah jadi (Wurdianto et al., 2024).

Pertanyaan yang paling sering muncul dari siswa, orang tua, maupun masyarakat adalah bagaimana cara belajar yang efektif, meraih nilai tinggi, lulus dengan cepat, dan mencapai jenjang pendidikan tertinggi seperti gelar doktor atau profesor. Tidak ada yang keliru dengan orientasi pembelajaran yang menekankan pada tanggung jawab, kerja keras, kejujuran, dan kedisiplinan—nilai-nilai yang memang penting dan patut dijunjung tinggi. Namun, saat ini mulai berkembang pola pembelajaran baru. Pertama, model pembelajaran yang masih berfokus pada pengembangan sikap tanggung jawab, ketergantungan, dan loyalitas, atau membentuk pribadi yang rajin dan jujur. Kedua, model pembelajaran yang lebih holistik dengan mengembangkan berbagai jenis kecerdasan seperti IQ (kecerdasan intelektual), EQ (kecerdasan emosional), SQ (kecerdasan spiritual), dan RQ (kecerdasan adversitas). Dalam kehidupan modern, kecerdasan intelektual saja tidak cukup, karena ada banyak situasi yang secara logis mungkin tidak benar, tetapi dirasakan benar secara emosional. Oleh karena itu, kemampuan berpikir rasional perlu dilengkapi dengan kecerdasan emosional.

Kecerdasan emosional berakar pada hati nurani dan kesadaran diri yang mendalam. Daniel Goleman (1999) menyebutkan bahwa EQ memiliki tiga unsur utama: (1) kemampuan untuk memanfaatkan nilai-nilai luhur dalam membuat keputusan dalam kehidupan sosial; (2) kemampuan reflektif untuk belajar dari pengalaman; dan (3) rasa percaya diri untuk menyatakan dan membela kebenaran (Goleman, 1999). Pengalaman spiritual atau nilai ketuhanan juga menjadi bagian penting yang dimiliki setiap individu, yang harus terus dikembangkan layaknya mengasah permata. Jika pendidikan hanya menitikberatkan pada kecerdasan intelektual semata, maka akan terjadi ketimpangan, karena kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga oleh nilai-nilai spiritual dan emosional. Tanpa itu, kehidupan bisa menjadi semakin menakutkan karena hanya berorientasi pada pencapaian materi.

Dana merupakan salah satu syarat yang ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Selama ini mutu pendidikan nasional rendah dikeluhkan karena dana yang tidak memadai. Benarkah pernyataan ini? Benarkah jika dana telah dipenuhi maka dengan sendirinya pendidikan bermutu akan tercapai? Penyelenggaraan pendidikan bermutu memang membutuhkan dana. Kurangnya pendanaan berdampak signifikan terhadap buruknya pengelolaan sektor pendidikan. Sebagai ilustrasi, banyak lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi tidak dikelola berdasarkan otoritas akademik, melainkan di bawah kendali birokrasi atau struktur administratif (Wurdianto et al., 2024). Akibatnya, iklim akademik di banyak kampus kurang mendukung semangat belajar dan mengajar. Fasilitas fisik seperti gedung dan ruang belajar cenderung sempit, berdekatan, dan tidak kedap suara, karena memang tidak dirancang untuk kegiatan akademik. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas bermain, perpustakaan yang memadai bagi warga akademik untuk membaca dan belajar, ruang diskusi, ruang seminar, serta ruang kerja dosen dan guru yang memberikan privasi. Bahkan, keberadaan laboratorium untuk eksperimen baik di dalam maupun luar ruangan pun sangat terbatas.

Jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan, sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas. Secara keseluruhan, hal ini tampak dari aspek pengelolaan pendidikan, peran pemerintah dan masyarakat, kurikulum, metode pembelajaran, kualitas sumber daya manusia, lingkungan pendidikan, pendanaan, hingga sistem akreditasi. Kesenjangan ini muncul akibat dinamika faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman.

a) Sistem Pendidikan Kejuruan di Indonesia

Sejarah pendidikan kejuruan berawal dari upaya manusia dalam mempelajari berbagai cara untuk bekerja. Melalui kerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sejak awal, manusia berusaha memperbaiki kehidupannya melalui aktivitas kerja, dan juga berupaya menemukan cara kerja yang lebih efisien. Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa setiap individu memiliki keunggulan dalam jenis pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, dalam lingkungan keluarga, laki-laki cenderung lebih

efektif dalam mengumpulkan bahan-bahan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan perempuan lebih terampil dalam mengolah dan memanfaatkan bahan-bahan tersebut.

Kemudian, manusia mulai mengembangkan keahlian khusus melalui praktik dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pertukangan kayu, pemotongan batu, peternakan, dan lain-lain. Pembagian kerja ini memberikan peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan mutu dan jumlah hasil kerja mereka. Dalam konteks ini, penggunaan metode pembelajaran baru menjadi penting, khususnya bagi generasi muda yang memiliki bakat tertentu dan diarahkan pada bidang kejuruan sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk mempelajari keterampilan ini, para pemuda memerlukan waktu dan pengalaman dalam sistem magang—sebuah bentuk awal dari organisasi pembelajaran yang kemudian berkembang (Roberts, 1965).

Pengertian Pendidikan Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan vokasi yang bertujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, pendidikan kejuruan juga dijelaskan secara lebih detail dalam Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan ini merupakan jenjang pendidikan menengah yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk pekerjaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Santika et al., 2023). Maka dengan itu, pendidikan vokasi atau kejuruan sangat menitikberatkan pada kebutuhan siswa agar setelah menyelesaikan pendidikannya, mereka siap menghadapi dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, dan praktik langsung di lapangan. Bekal yang diberikan oleh lembaga SMK ini lebih difokuskan kepada bekal keterampilan yang menjadi fokus utama, sehingga ilmu yang diberikan oleh sekolah pada peserta didik dapat berhubungan dengan tujuan SMK itu sendiri, dan tentunya diharapkan agar peserta didik mendapatkan ilmu yang sebanyak banyaknya agar bisa mengembangkan potensinya juga bisa berkarir dan beradaptasi di lingkungan kerja nantinya (Roseno & Wibowo, 2019).

Kerja sama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dunia industri tidak terjadi secara instan, melainkan memerlukan kepercayaan dari kedua belah pihak agar kolaborasi dapat terwujud. Hubungan kerja sama ini akan berjalan efektif jika kedua pihak mampu menjaga komitmen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, yang umumnya diformalkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Namun, kesepakatan tertulis saja tidak cukup; penting adanya pelaksanaan nyata yang sesuai dengan isi kerja sama tersebut. Pendapat Wardiman (1998) bahwa mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja atau dunia industri itu merupakan salah satu karakteristik dari pendidikan kejuruan yang dalam hal ini sudah seharusnya pendidikan kejuruan (SMK) berdasarkan pada permintaan dunia kerja (Wardiman, 1998). Kerjasama tersebut mencakup PKL, guru tamu, rekrutmen, dan juga validasi kurikulum dengan pihak industri (Santika et al., 2023).

IV. PEMBAHASAN

A. Perspektif Wakasek Kesiswaan SMK 1 Negeri Kedawung Tentang Kebijakan *Model Dual System Ausbildung* di Indonesia dan Jerman

Pendidikan vokasi menjadi pilar penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Di berbagai negara maju, sistem pendidikan vokasi telah mengalami berbagai evolusi, salah satunya adalah program *Ausbildung* di Jerman. Program ini dikenal luas sebagai model pendidikan kejuruan berbasis *dual system*, di mana peserta didik menjalani pembelajaran teoritis di lembaga pendidikan serta praktik kerja di dunia industri secara seimbang. Durasi *Ausbildung* umumnya berlangsung selama tiga tahun dan dirancang untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dan etos kerja profesional sebelum benar-benar memasuki dunia kerja.

Ciri khas dari Ausbildung adalah struktur pembelajarannya yang integratif dan siklikal. Peserta didik menjalani satu tahun pendidikan teori secara intensif, kemudian dilanjutkan dengan penempatan kerja yang relevan dengan bidang keahliannya. Setelah itu, mereka kembali ke institusi pendidikan untuk melakukan refleksi dan memperdalam pemahaman berdasarkan pengalaman lapangan. Siklus ini diulang hingga peserta mampu menunjukkan kompetensi yang utuh dan siap kerja. Di samping itu, sistem Ausbildung juga memiliki batasan usia minimal 18 tahun untuk memastikan kesiapan mental dan legal peserta dalam menghadapi dunia kerja yang kompleks dan penuh tanggung jawab.

Sebaliknya, pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan dual system seperti di Jerman. Hal ini terungkap dalam wawancara mendalam dengan salah satu informan, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Menurut beliau, sistem pendidikan vokasi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pembelajaran di dalam kelas, sedangkan kegiatan praktik di industri masih bersifat pelengkap dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum secara sistemik.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang di SMK belum mampu memberikan pengalaman kerja yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Banyak industri yang masih memposisikan peserta PKL sebagai tenaga bantu administratif, seperti melakukan fotokopi, mengarsipkan dokumen, atau melakukan tugas-tugas sederhana lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan bidang keahlian siswa. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kepercayaan industri terhadap lulusan SMK serta kurangnya kesiapan sistem untuk membangun relasi simbiotik antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.

Informan juga menggarisbawahi bahwa usia siswa SMK yang rata-rata masih berada pada rentang 15–17 tahun menjadi salah satu hambatan tersendiri. Menurutnya, siswa dengan usia tersebut masih dalam tahap pencarian jati diri, emosional yang belum stabil, serta kemampuan tanggung jawab yang belum sepenuhnya matang. Hal ini berdampak pada relasi kerja di lapangan, di mana perusahaan enggan memberikan tugas-tugas teknis atau kritikal kepada siswa karena dinilai belum siap baik secara psikologis maupun etika kerja.

Selain itu, tantangan besar lainnya adalah tidak adanya sistem pemberian insentif atau allowance bagi peserta magang. Dalam sistem Ausbildung, peserta secara resmi dipekerjakan oleh perusahaan dan mendapatkan bayaran layaknya karyawan magang. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar dan kerja, tetapi juga membentuk budaya kerja yang positif sejak dini. Sebaliknya, di Indonesia sebagian besar peserta magang tidak menerima insentif, yang pada akhirnya menurunkan antusiasme dan nilai profesionalisme dalam pengalaman magang.

Dalam beberapa kasus, seperti di daerah industri besar semacam Karawang, memang terdapat SMK-SMK yang telah menjalin kerja sama yang lebih erat dengan industri, dan memungkinkan adanya pelatihan kerja yang lebih mendalam, termasuk pemberian allowance serta peluang penempatan kerja. Namun, informan menegaskan bahwa pola tersebut masih sangat terbatas dan belum merata secara nasional. Di SMKN 1 Kedawung sendiri, upaya ke arah tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum mencapai model ideal seperti sistem Ausbildung.

Menurut informan, program Ausbildung sangat relevan untuk diadaptasi di Indonesia dengan mempertimbangkan perbedaan konteks budaya, ekonomi, serta struktur kelembagaan pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan regulasi nasional yang mendukung implementasi pendidikan vokasi berbasis industri secara nyata. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang memberikan insentif bagi dunia usaha agar bersedia menjadi mitra pendidikan, mengatur usia minimal peserta PKL agar lebih matang secara psikologis, serta mendorong integrasi kurikulum antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik di SMK, penguatan infrastruktur praktik, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis kompetensi. Informan juga menambahkan bahwa

sistem vokasi Indonesia cenderung mengikuti pola Australia, yaitu dominasi teori dengan penempatan kerja di akhir masa studi. Perbedaan ini perlu dipertimbangkan jika ingin mengadopsi sistem Jerman, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau ketidaksesuaian implementasi di lapangan.

Secara keseluruhan, wawancara dengan informan dari SMKN 1 Kedawung memperkuat temuan bahwa sistem vokasi di Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju keterpaduan dengan dunia industri. Adopsi elemen-elemen dari Ausbildung Jerman memang menjanjikan peningkatan kualitas lulusan vokasi, tetapi diperlukan transformasi menyeluruh pada aspek kebijakan, kesiapan institusi pendidikan, serta keterlibatan aktif dunia usaha. Hanya dengan sinergi dari ketiga komponen tersebut, pendidikan vokasi Indonesia dapat mencapai kualitas dan relevansi yang sebanding dengan negara-negara maju.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sistem pendidikan di Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan yang cukup mencolok, keduanya juga menunjukkan beberapa kesamaan meskipun dengan istilah dan pendekatan yang berbeda. Baik pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri memiliki nilai positif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya ke depan. Sistem pendidikan kejuruan di Jerman dikenal sangat terstruktur dan terintegrasi. Jika dibandingkan dengan negara maju lainnya, biaya pendidikan tinggi di Jerman tergolong sangat rendah, bahkan dalam banyak kasus tidak dikenakan biaya.

Namun, karena Indonesia masih termasuk negara berkembang, terdapat berbagai hambatan dalam mengadopsi *Dual System Ausbildung* seperti di Jerman. *Dual System Ausbildung* sendiri merupakan model pendidikan dan pelatihan vokasi yang diakui secara internasional, karena memberikan banyak keuntungan bagi siswa. Beberapa keunggulannya antara lain kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri, kesempatan memperoleh pengalaman kerja langsung, prospek karier yang lebih cerah disertai penghasilan yang menjanjikan, serta pembelajaran langsung di tempat kerja. Meski demikian, penerapan sistem ini di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal kesesuaian kurikulum, kualitas pelaksanaan, dan partisipasi industri, meskipun berbagai upaya pembenahan terus dilakukan.

B. Saran

Melihat kesuksesan program Ausbildung di Jerman, terdapat beberapa praktik yang dapat diterapkan di Indonesia. Pertama, perlu diperkuat kerja sama antara sekolah dan dunia industri agar lulusan SMK lebih selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kedua, perlu dioptimalkan pelaksanaan pemberian insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam pelatihan siswa, misalnya melalui skema insentif pajak seperti program *supertax deduction* yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019. Ketiga, penting untuk menyelaraskan standar pelatihan bagi para guru, baik guru kejuruan maupun non-kejuruan, agar mereka tidak hanya menguasai aspek teoritis tetapi juga memiliki pengalaman praktis melalui proses *reskilling* dan *upskilling*. Di sisi lain, keberagaman jurusan yang tersedia di SMK Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi Jerman untuk lebih fleksibel dalam menyusun program kejuruan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan menggabungkan keunggulan dari kedua sistem, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi tenaga kerja yang terampil dan tangguh dalam menghadapi dinamika pasar global. Pendidikan vokasi pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam membangun perekonomian yang kompetitif.

VI. REFERENSI

A, M., Gani, H. A., & Purnamawati. (2023). Kedudukan Dan Status Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Di Denmark Dan Indonesia. *UNM Journal of Technology and Vocational*, 7(2), 130.

<https://doi.org/10.26858/ujtv.v7i2.41040>

- Adytiya, & Sassi, K. (2024). Historitas Dualisme Peran Lembaga Negara dan Agama dalam Sistem Pendidikan di Jerman. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7253–7262. <https://doi.org/ISSN : 2828-5271> (online)
- Alnoth, Z. C. N. (2024). Kerja Sama Indonesia-Jerman Melalui Program Ausbildung Dalam Bidang Pendidikan Vokasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 2997–3012. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2993>
- Arif Rembangsupu, Kadar Budiman, Bidin, Puspita, & Muhammad Yunus Rangkuti. (2022). Studi Yuridis Tentang Jenis Dan Jalur Pendidikan Di Indonesia. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 91–100. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.337>
- Astuti, W. P., Susilana, R., & Johan, R. C. (2024). Comparative Analysis of Agriculture Curriculum with Agronomy Concentration in Vocational High Schools in Germany and Indonesia. *JURNAL EDUCATIVE: Journal of Educational Studies*, 9(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/educative.v9i2.9086>
- Bappenas. (2017). *Babak Baru Kerja Sama Indonesia-Jerman dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Vokasi*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/babak-baru-kerja-sama-indonesia-jerman-dalam-pendidikan-dan-pelatihan-teknik-dan-vokasi-qqf5fe>
- Goleman. (1999). Working With Emotional Intelligence. In *USA and Canada: Bantam Book* (pag. 63).
- Heri Laksana. (2018). *Politik Pembangunan Negara Jepang Pasca Perang Dunia Ke II*.
- Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. In *Thousand Oaks, CA: Sage Publications*. ((Edisi ke-)). [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(02\)00184-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0005-7967(02)00184-5)
- Isri, S. (2015). Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 25. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>
- Ivanova, I., Arcelus, F. J., & Srinivasan, G. (1999). An Assessment of the Measurement Properties of the Human Development Index. *Social Indicators Research*, 46(2), 157–179.
- Laoli, R. (2024). Kerja Sama Indonesia dan Jerman : Studi tentang Regulasi terkait Program Ausbildung di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 6(2), 174–187. <https://doi.org/10.24198/padjirv6i2.55777>
- Mustafa. (2018). Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman. *Jurnal Ilmiah Iqra*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/jii.v6i1.617>
- Pidarta, M. (1997). Landasan Pendidikan. In *Jakarta, Rineka Cipta* (pag. 201).
- PUTRA SEPTO ADI. (2021). IMPLEMENTASI PERWAL PASAL 7 NO.23 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN (Studi kasus di (DP3AP2KB). In *Skripsi*.
- Roberts, R. W. (1965). Vocational and Practical Aris Education. In *Harper and Row, New York*, (pag. 31).
- Roseno, I., & Wibowo, U. B. (2019). Efisiensi eksternal pendidikan kejuruan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 15–24. <https://doi.org/10.21831/amp.v7i1.10558>
- Santika, A., Simanjuntak, E., Amalia, R., Kurniasari, S., & Artikel, R. (2023). Peran Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Memposisikan Lulusan Siswanya Mencari Pekerjaan Info Artikel

Abstrak. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 14(1), 84–94.

- Sihombing, A. adrianus. (2019). Gerakan Karismatik dalam Gereja Katolik dan Protestan. *Penamas*, 32(2), 359–372. <https://doi.org/https://doi.org/10.31330/penamas.v32i2.291>
- Suharno, Pambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational education in Indonesia: History, development, opportunities, and challenges. *Children and Youth Services Review*, 115, 105092. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.105092>
- Tiasari, W. N., Hadi, S., Suswanto, H., Kejuruan, P., Malang, U. N., & Malang, U. N. (2025). ANALISIS SISTEMATIS INOVASI PENDIDIKAN VOKASI : STUDI SISTEM GANDA DALAM TVET DI BERBAGAI NEGARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(1), 155–166. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i1.4922>
- Wahab Syakrani, A., Hamid, A., Bakri, A., Baharuddin, M., & Najemi, M. K. (2022). Pendidikan dan Sistem Pendidikan di Negara Indonesia dan Negara lain. *Adiba: Journal of Education*, 2(3), 399–412.
- Wardiman. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*.
- Wiriadidjaja, A., Andriasanti, L., & Jane, A. (2019). Indonesia-Germany Cooperation in Vocational Education and Training. *Journal of Local Government Issues*, 2(2), 178. <https://doi.org/10.22219/logos.vol2.no2.178-192>
- Wurdianto, K., Juwita, D. R., Wisman, Y., & Bernisa, B. (2024). Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293>